

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu faktor yang menghambat pembangunan nasional adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu masalah ketika seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan cara hidup mereka. Selain itu, kemiskinan merupakan akibat dari ketidakmampuan masyarakat yang terus-menerus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara materi maupun non-materi.¹

Penyakit sosio-ekonomi yang dikenal sebagai kemiskinan mempengaruhi hampir setiap negara bahkan negara maju dan negara berkembang. Pada tahun 2023, Indonesia sebagai negara yang melimpah akan sumber daya alam, mempunyai 25,90 juta penduduk yang hidup dalam kemiskinan. 7,29 persen atau 11,74 juta orang tinggal di perkotaan dan 12,22 persen atau 14,16 juta di pedesaan.² Persentase ini menunjukkan betapa tingginya angka kemiskinan di Indonesia dan betapa fokusnya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dalam rangka pembangunan nasional.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, menyatakan bahwa seseorang dikatakan miskin jika tidak mempunyai

¹ Amelia Fajri and others, „ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN“, *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 7 (2022) <file:///C:/Users/User/Downloads/43659-142131-1-PB.pdf>.

² „Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023“, *Badan Pusat Statistik*, 2023 <<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>>.

sumber penghasilan atau mempunyai sumber penghasilan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk itu pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan penanganan yang tepat sasaran dan berjangka panjang bagi masyarakat miskin.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK MISKIN KAB/KOTA		
	2021	2022	2023
Provinsi Jambi	293,86	279,37	280,68
Kerinci	18,45	18,20	18,21
Merangin	35,44	34,14	35,19
Sarolangun	27,06	26,23	26,77
Batanghari	27,24	26,24	25,88
Muaro Jambi	20,49	20,64	20,83
Tanjung Jabung Timur	24,42	23,42	23,33
Tanjung Jabung Barat	36,10	33,95	33,61
Tebo	23,77	22,81	23,47
Bungo	23,64	20,69	20,65
Kota Jambi	54,23	50,40	50,09
Kota Sungai penuh	3,03	2,64	2,66

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2021-2023

Ada banyak daerah yang mengalami kemiskinan, salah satunya adalah Provinsi Jambi dengan jumlah 280,68 ribu penduduk miskin yang tersebar di beberapa wilayah. Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa Kota Jambi merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi dibandingkan dengan daerah lainnya dengan jumlah 50,09 ribu atau sebesar 8,24%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kota Jambi yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 9,36% dengan garis kemiskinan sebesar Rp 667.447 /kapita, melebihi angka kemiskinan secara nasional sebesar Rp 550.458 /kapita yang menunjukkan bahwa Kota Jambi

masih menghadapi tantangan terbesar dalam mengatasi masalah kemiskinan.³ Hal ini disebabkan karena adanya proses urbanisasi penduduk dari pedesaan yang disebabkan oleh faktor sosial dan budaya serta melimpahnya tenaga kerja namun lapangan pekerjaan yang sedikit serta rendahnya pendapatan dari kegiatan-kegiatan marginal. Oleh karena itu, kecenderungan memusatnya penduduk di kota besar atau menengah menyebabkan persoalan kemiskinan di perkotaan dianggap jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kemiskinan di pedesaan.⁴

Pengusiran/pengusiran kaum urban merupakan cara lama yang belum mampu menyelesaikan masalah, bahkan lebih parahnya lagi mampu menimbulkan masalah baru yang lebih rumit. Berbagai strategi telah digunakan oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yaitu, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat dengan memberdayakan dan mencegah munculnya bentuk-bentuk kemiskinan yang baru melalui kepatuhan terhadap strategi perencanaan mendasar termasuk memenuhi kebutuhan dasar, membangun jaminan sosial, dan menumbuhkan budaya bisnis.⁵

Permasalahan kemiskinan ini harus terus diantisipasi guna menghindari dampak negatif yang akan ditimbulkan berupa tindakan kriminalitas, meningkatnya angka kematian, meningkatnya jumlah pengangguran, putus sekolah, timbulnya berbagai masalah kesehatan di masyarakat, dan lain-lain.

³ „Persentase Penduduk Miskin (P0) 2021-2023“, *Badan Pusat Statistik*.

⁴ Idi Ibrahim, *Jurnalisme Kemiskinan* (PT Kompas Media Nusantara, 2020).

⁵ Trimo Yulianto, „Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Sebagai Sumber Penerimaan Negara“, *Kemenkeu RI*, 2023
<<https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html>>.

Oleh karena itu, kemiskinan ini merupakan suatu persoalan yang mendesak yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan di masyarakat sehingga peran pemerintah sangat penting dalam menurunkan angka kemiskinan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁶

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH), menjelaskan bahwa PKH menjadi program ampuh dari pemerintah pusat untuk membantu masyarakat dalam mengentas kemiskinan dengan memberi bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH dengan persyaratan tertentu dimana mereka harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi yang diluncurkan sejak tahun 2007 lalu yang diperuntukkan untuk anak sekolah, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta lanjut usia untuk mempertahankan kesejahteraan sosial mereka.⁷

Oleh karena itu, peserta PKH wajib menyelesaikan berbagai tugas, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan. Syarat kesehatan yang dimaksud antara lain imunisasi anak balita, pemberian asupan makanan, dan melakukan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil. Sementara itu, mendaftarkan anak ke sekolah dasar dan menengah merupakan syarat pendidikan yang dimaksud. Keuntungan jangka pendek dan jangka panjang akan

⁶ Tria Dewi, „Kemiskinan Di Indonesia Yang Tak Kunjung Usai“, *JDIH Kabupaten Sukoharjo* <<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/kemiskinan-di-indonesia-yang-tak-kunjung-usai#>>.

⁷ „Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan“, *Direktorat Jaminan Sosial Keluarga*, 2021 <<https://kemensos.go.id/uploads/topics/16202973084877.pdf>>.

diperoleh dari PKH karena PKH akan berupaya untuk mengurangi beban keuangan rumah tangga dan siklus kemiskinan melalui peningkatan potensi pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan gizi anak-anak di masa depan.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Sosial tersebut, pada tahun 2012 lalu pemerintah Kota Jambi telah menyalurkan bantuan finansial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Jambi yang di koordinasikan melalui Dinas sosial yang memiliki tugas untuk menyusun kegiatan PKH, mengawasi dan mengelola operasional PKH. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang sudah terdaftar di DTKS. Meskipun bantuan yang diberikan di Kota Jambi berbeda-beda tergantung kriterianya, namun seluruh kriteria bertujuan untuk mendukung setiap orang sesuai dengan kebutuhannya. Selain memberikan keringanan finansial, program ini juga menjadi salah satu contoh nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat di Kota Jambi.⁸ Mengingat peran pemerintah salah satunya adalah memfasilitasi, maka pemerintah Kota Jambi mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan setiap warga Kota Jambi.

Sasaran Program Keluarga Harapan sebagaimana telah tercantum dalam pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 merupakan keluarga atau individu yang rentan dan kurang mampu serta terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin yang meliputi komponen kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

⁸ Achmad Kurniawan, „Di Jambi Bansos PKH Tahap 4 2023 Sudah Cair, Berikut Daftar Penerima Rp1 Juta Di Kota Jambi!“, 2023 <<https://www.nusahits.com/ekonomi-bisnis/6169927293/di-jambi-bansos-pkh-tahap-4-2023-sudah-cair-berikut-daftar-penerima-1-juta-di-kota-jambi?page=3>>.

Selanjutnya pasal 5 menyebutkan dan menegaskan bahwa kriteria penerima PKH ini meliputi:

1. Kriteria komponen kesehatan, meliputi:
 - a. Anak berusia 0 sampai dengan usia 6 tahun
 - b. Ibu hamil/menyusui
2. Kriteria komponen pendidikan, meliputi:
 - a. Anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun
 - b. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat
 - c. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat, dan
 - d. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial, meliputi:
 - a. Penyandang disabilitas, dan
 - b. Lanjut usia mulai dari 60 tahun.⁹

Dari beberapa kriteria yang disebutkan diatas, bahwa terdapat beberapa kriteria komponen yang menjadi tanggungjawab PKH dalam menangani masalah kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kriteria tersebut yaitu komponen kesejahteraan sosial yang meliputi penyandang

⁹ „Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan“.

disabilitas. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dimana mereka akan berhadapan dengan berbagai hambatan yang menyebabkan mereka tidak dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Selain itu, penyandang disabilitas juga merupakan salah satu kelompok masyarakat yang paling tertinggal secara ekonomi.¹⁰ Oleh karena itu, sebagian besar penyandang disabilitas tidak mampu untuk memiliki tempat tinggal sendiri dan harus bergantung pada orang lain. Hal ini merupakan suatu tanggungjawab yang dimiliki oleh Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memperhatikan masyarakat.

Pada Tahun 2023, tercatat bahwa jumlah individu penyandang disabilitas di Kota Jambi yakni sebesar 1.112 orang yang tersebar di beberapa kecamatan. Diantara besarnya jumlah tersebut, terdapat penyandang disabilitas sedang dan berat yang mengalami hambatan untuk dapat berpartisipasi di lingkungan masyarakat sehingga perlindungan sosial merupakan salah satu hal utama yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses kesetaraan dengan memberikan standar hidup yang layak dan meningkatkan jaminan pendapatan dasar sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan kerentanan. Untuk itu, PKH harus memastikan bahwa setiap keluarga yang memiliki anggota dengan disabilitas harus mendapatkan dukungan sesuai dengan yang mereka butuhkan termasuk pemenuhan aksesibilitas, pendidikan inklusif, pelayanan kesehatan terhadap disabilitas, serta pendampingan rehabilitasi yang

¹⁰ Haryanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas* (Media Nusa Creative, 2021).

memungkinkan masyarakat penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup mereka. Untuk itu, program ini sangat dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan atau implementator, dan dalam pelaksanaannya harus jelas dan konsisten.

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi” yang dilakukan oleh Cholin Adelina Sianturi tahun 2023. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan dan efektivitas program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Danau Teluk sudah mampu memberikan peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar yang dimiliki oleh masyarakat penerima PKH. Peningkatan taraf hidup, pendidikan dan pendapatan masyarakat penerima PKH sudah terpenuhi karena menyebabkan masyarakat mengalami peningkatan kehidupan secara merata, mengalami peningkatan pendapatan bagi KPM yang memanfaatkan dana PKH, serta indikator memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa sudah terpenuhi karena program PKH sudah menyediakan sarana dan prasarana perekonomian yang dapat menunjang kehidupan masyarakat.¹¹

¹¹ Cholin Adelina, „Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam

Penelitian lainnya yang di susun oleh Aditya Kriswanto pada tahun 2021 dengan judul “Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Timur Kota Jambi”. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PKH di Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dilihat dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kepuasan telah terpenuhi dan terlaksana dengan baik dan tepat sasaran sehingga membuat masyarakat miskin penerima bantuan PKH menjadi sangat terbantu. Namun, pada bagian kesehatan lebih rendah dibandingkan dimensi lain karena masih ada yang belum melengkapi dokumen persyarakatan¹²

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sintia Farnelia pada tahun 2019 dengan judul “Fungsi Dinas Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi”. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menetapkan kriteria dan data penerima, ada beberapa masyarakat yang tidak memenuhi kriteria dalam mendapatkan bantuan program ini, banyak keluarga yang sudah mampu tetapi justru masih mendapatkan bantuan. Hal tersebut dikarenakan pihak Dinas Sosial masih mengandalkan data lama. Namun untuk pengalokasian dana sudah sangat sesuai dengan mekanisme yang ada.¹³

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi”, 2023.

¹² Aditya Kriswanto, „Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Timur Kota Jambi“, 2021.

¹³ Sintia Farnelia, „Fungsi Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi“, 2019.

terletak pada target penelitian yang berbeda yaitu efektivitas dan evaluasi PKH dalam pengurangan kemiskinan, sedangkan pada penelitian ini, peneliti hanya akan membahas implementasi PKH dan fokus pada peningkatkan kesejahteraan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Jambi. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENANGANI MASALAH KEMISKINAN (Studi Kasus Pada Penyandang Disabilitas Di Kota Jambi)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi penyandang disabilitas di Kota Jambi?
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam pengimplementasian PKH bagi penyandang disabilitas di Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) bagi penyandang disabilitas dalam menangani masalah kemiskinan di Kota Jambi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani hambatan pelaksanaan program PKH bagi penyandang disabilitas di Kota Jambi

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan bantuan sosial PKH terhadap penyandang disabilitas dalam menangani masalah kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait khususnya Dinas Sosial sebagai penyelenggara pelayanan publik dan juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian tentang implementasi program keluarga harapan (PKH).

1.5 Landasan Teori

Implementasi Kebijakan

Implementasi dapat dipahami sebagai suatu proses penerapan atau implementasi, yang secara teori merupakan suatu cara untuk menjamin suatu kebijakan dapat mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Ketika perencanaan dianggap selesai, pelaksanaannya sering kali dimulai dengan mempertimbangkan secara hati-hati apakah program tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat atau tidak, dengan tujuan untuk memastikan

bahwa program tersebut tidak menimbulkan kerugian atau konflik.¹⁴

Oleh karena itu, implementasi adalah suatu prosedur yang memanfaatkan berbagai sumber daya seperti uang, tenaga kerja, dan keterampilan organisasi yang dilakukan oleh sektor publik atau swasta agar mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Oleh karena itu, penerapan kebijakan yang memberikan hasil, manfaat, dan dampak yang dapat dirasakan oleh kelompok sasaran merupakan usaha dalam mengubah kebijakan yang abstrak menjadi kenyataan yang sebenarnya.¹⁵

Suatu kebijakan juga dapat gagal dalam implementasinya apabila suatu kebijakan tertentu yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, tetapi tidak didukung oleh kondisi eksternal seperti adanya bencana alam, pergantian kekuasaan yang secara tiba-tiba, dan lain-lain sehingga kebijakan tersebut tidak dapat mencapai dampak yang diharapkan.¹⁶ Dari sudut pandang pusat, segala tindakan yang diambil oleh lembaga di tingkat pusat, pejabat, atau pengawas, untuk mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pejabat atau lembaga di tingkat bawah/daerah dalam upaya menjamin pemberian pelayanan termasuk dalam implementasi itu sendiri, juga memberikan perubahan atas perilaku masyarakat maupun kelompok yang menjadi sasaran dari program yang bersangkutan.

¹⁴ Joko Pramono, *IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK* (UNISIRI Press, 2020).

¹⁵ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik* (MNC Publishing, 2021).

¹⁶ Puput Harianti, Barlian, and Eka Suaib, „Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Kendari“, *Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11 (2020).

Berdasarkan hal tersebut, Van Mater dan Van Horn mendefinisikan bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pejabat maupun kelompok pemerintah atau swasta yang telah diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan, merupakan suatu bentuk dari implementasi kebijakan. Proses ini terjadi dalam hubungan berbagai faktor dan sengaja dilakukan untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan yang tinggi. Untuk itu, ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan yaitu:

- 1) Standart dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan kebijakan

Sasaran dan metrik kebijakan yang realistis dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu kebijakan untuk diterapkan. Untuk mengukur hal tersebut, maka pihak yang bertanggungjawab dalam menerapkannya harus memenuhi serangkaian persyaratan dan tujuan. Penting bagi para pelaksana kebijakan untuk memahami standar dan target kebijakan. Apabila kurangnya pengetahuan terhadap hal tersebut maka dapat menyebabkan kegagalan kebijakan.

- 2) Sumber Daya

Salah satu yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah dengan cara memanfaatkan sumber daya. Sumber daya ini terdiri dari dana ataupun intensif lainnya yang mampu memperlancar implementasi suatu kebijakan sehingga terbatas ataupun kurangnya dana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan akan menyumbang

kegagalan. Terdapat beberapa hal yang menjadi sumber daya utama faktor. Oleh karena itu, salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan ini adalah manusia sebagai penentu keberhasilan dari implementasi kebijakan. Selain itu, sumberdaya finansial dan waktu juga tidak kalah pentingnya serta sumber daya kebijakan yang juga memiliki peran penting sama halnya dengan komunikasi. Hal ini dikarenakan sumber daya kebijakan berfungsi untuk membantu mengelola pelaksanaan kebijakan.

3) Karakteristik Badan Pelaksana

Penanggung jawab pelaksanaan kebijakan adalah agen pelaksana kebijakan yang mencakup kelompok formal dan informal. Ini dianggap sangat penting karena sifat yang tepat dan kesesuaian dari agen pelaksana mempunyai dampak besar terhadap seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan. Dalam beberapa situasi kebijakan, implementasi yang ketat dan teratur sangatlah penting. Untuk itu sangat dibutuhkan agen pelaksana yang persuasif serta demokratis.

4) Komunikasi antar badan pelaksana

Komunikasi yang baik juga diperlukan untuk aktivitas yang baik. Supaya kebijakan publik dapat berjalan dengan baik, mereka yang bertanggung jawab untuk menyukseskannya harus bertanggungjawab untuk menerapkannya dan harus menyadari tujuan standarnya. Untuk memberikan informasi mengenai standar dan tujuan, diperlukan

komunikasi yang baik dan konsisten dari berbagai sumber kepada para pelaksana kebijakan. Data yang dikumpulkan disini harus tepat dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Untuk itu dalam mengelola komunikasi yang efektif, sangat penting untuk membangun dan mengembangkan saluran komunikasi yang efisien. Kemungkinan bahwa pesan akan disampaikan secara akurat dan benar seiring dengan peningkatan hubungan komunikasi. Perintah yang akurat dan mudah dipahami diperlukan untuk komunikasi yang efektif. Akan sangat sulit untuk mencapai tujuan dan standar kebijakan apabila tidak ada keseragaman, kejelasan, dan konsistensi. Para pelaksana kebijakan akan dapat mengetahui secara pasti apa yang dapat diharapkan dari mereka dan apa yang perlu mereka lakukan dengan adanya kejelasan ini. Di lembaga publik pemerintah daerah misalnya , komunikasi merupakan proses yang menantang dan rumit. Disengaja atau tidak, sering kali terjadi kesalahan dalam menyebarkan berita didalam suatu organisasi, antar organisasi, maupun kepada komunikator lainnya. Para pelaksana kebijakan mungkin mendapati bahwa implementasi kebijakan dimasa depan akan lebih menantang secara keseluruhan jika terdapat informasi yang mengungkapkan pandangan yang berbeda mengenai standar dan tujuan. Oleh karena itu, komunikasi yang akurat dan konsisten kepada para pelaksana kebijakan sangat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, koordinasi merupakan alat yang berguna untuk menerapkan kebijakan. Semakin efektif pihak-pihak yang terlibat dalam

implementasi kebijakan berkomunikasi dan berkoordinasi, maka semakin sukses pula implementasi kebijakan tersebut. Sehingga akan memungkinkan kecil terjadinya kesalahan dan sebaliknya.

5) Disposisi atau sikap pelaksana

Van Metter dan Van Horn memiliki pendapat bahwa menerima atau menolak agen pelaksana kebijakan mempunyai dampak yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan penerapan kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan publik yang ditetapkan tidak dikembangkan oleh masyarakat setempat yang memahami kesulitan dan permasalahan yang mereka hadapi. Namun biasanya kebijakan publik dibuat dari tingkat atas kebawah sehingga memberikan ruang bagi pengambil keputusan untuk mengabaikan atau bahkan tidak mampu memahami persyaratan, tujuan, dan permasalahan yang perlu ditangani. Pendapat mereka terhadap suatu kebijakan dan bagaimana mereka memandang dampaknya terhadap kepentingan pribadi dan organisasi akan sangat mempengaruhi sikap mereka. Menurut Van Matter dan Van Horn, menentukan pandangan pelaksana terhadap penerapan kebijakan merupakan langkah awal dalam menentukan disposisi dalam implementasi kebijakan. Ada tiga aspek yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan suatu kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

- a. Intensitas terhadap kebijakan
- b. Pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan,
- c. Arah respon mereka apakah menerima, netral, atau bahkan menolak (acceptance, neutrality, and rejection)

Penting untuk memahami arti luas dari norma dan tujuan kebijakan. Sebab, jika pelaksana tidak menyadari sepenuhnya kriteria dan tujuan kebijakan, maka kebijakan yang berhasil bisa berakhir dengan kegagalan. Penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana perasaan para pelaksana kebijakan terhadap tujuan dan standar kebijakan. Ketika para pelaksana kebijakan menolak tujuan suatu kebijakan, mereka beresiko gagal dalam melaksanakannya. Pada akhirnya cara kebijakan diimplementasikan akan bergantung pada bagaimana para pelaksana memilih para pelakunya. Kegagalan untuk menerapkan kebijakan mungkin disebabkan oleh kurangnya kecenderungan atau karena intensitasnya yang tidak memadai.

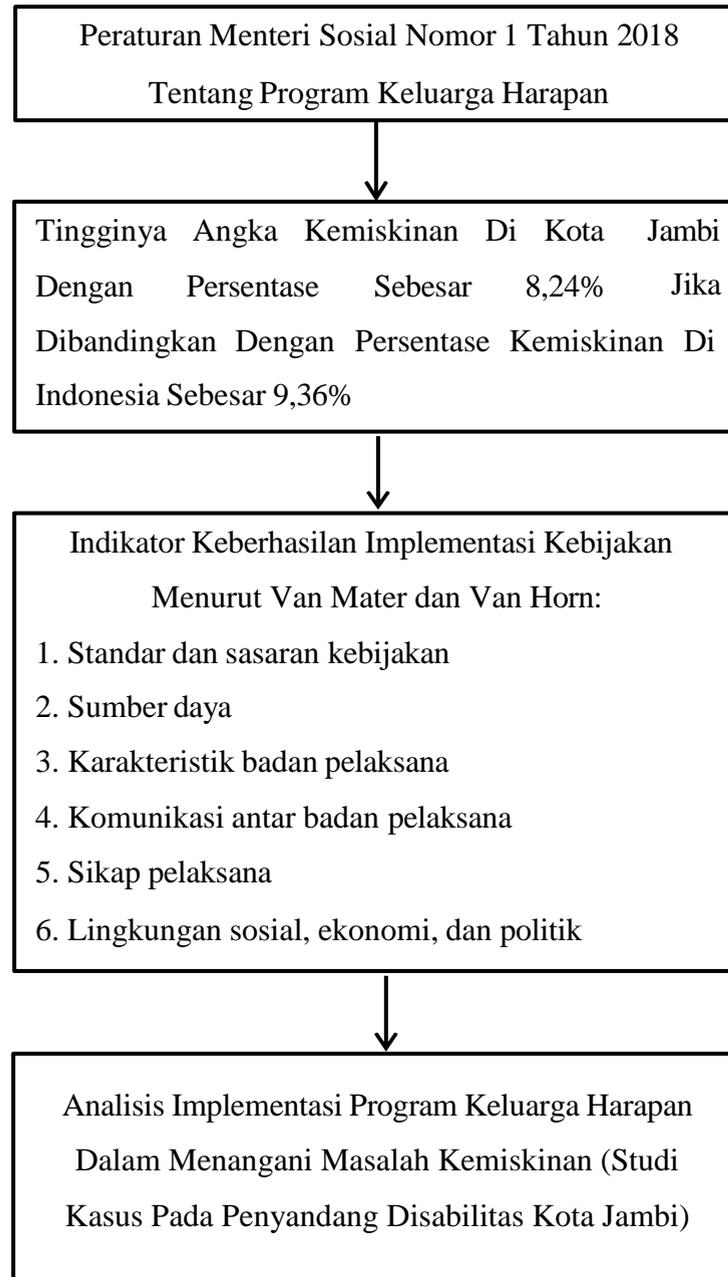
6) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Terakhir, penting untuk mempertimbangkan sejauh mana variabel luar mempengaruhi kemungkinan keberhasilan suatu kebijakan publik. Lingkungan mempunyai dampak besar terhadap seberapa baik kebijakan di implementasikan. Situasi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak menguntungkan merupakan permasalahan yang timbul dari kinerja

implementasi kebijakan yang buruk. Untuk itu, supaya implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar dan terkendali, maka upaya pelaksanaan kebijakan memerlukan lingkungan yang eksternal yang dapat mendukungnya.¹⁷

¹⁷ Solichin Wahab, *ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (PT Bumi Aksara, 2020).

1.6 Kerangka Pikir



1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif merupakan jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif ini adalah jenis penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Jenis penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara detail semua data dan juga keadaan yang berkaitan dengan subjek maupun objek penelitian. Kemudian, data tersebut akan dianalisis dan dibandingkan dengan keadaan yang sedang terjadi saat ini. Penelitian ini juga berusaha untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dan memberikan informasi terkini yang dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk diterapkan pada masalah yang relevan.¹⁸

Adapun pertimbangan dalam menggunakan jenis penelitian ini dikarenakan metode kualitatif mampu dan mudah untuk menyesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan ganda. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti ingin mencoba untuk memahami makna dari suatu kejadian melalui interaksi yang dilakukan bersama dengan orang dalam situasi atau fenomena tersebut.¹⁹ Selain itu, jenis penelitian kualitatif ini juga memungkinkan peneliti untuk mendalami pemahaman mengenai dinamika interaksi antara pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

¹⁹ Musri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2014).

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menggambarkan situasi akurat dari objek yang sedang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Jambi karena Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang mempunyai wewenang untuk mengatur serta mengurus bantuan sosial di Kota Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan, maka peneliti akan membatasi fokus penelitian. Penelitian ini akan mengeksplorasi terkait bagaimana pelaksanaan dari program keluarga harapan (PKH) serta tindakan apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi hambatan yang timbul pada proses implementasi tersebut.

1.7.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua kategori yang akan memberikan informasi mengenai kebutuhan penelitian, yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti melalui informasi secara langsung terhadap objek penelitian. Data yang diperoleh akan menghasilkan catatan tertulis atau catatan lapangan terkait apa saja yang telah didengar, dilihat, dialami, juga dipikirkan dalam memperoleh data sehingga hasil dari catatan tersebut akan digunakan sebagai penunjang yang dilakukan oleh peneliti dalam

melaksanakan penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang merujuk pada informasi yang diperoleh berdasarkan referensi untuk mendukung data primer. Jenis data ini mencakup buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen, maupun media digital (berita).

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Dalam penentuan informan, tentunya didasarkan pada keterlibatan mereka dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Informan penelitian merupakan orang yang memiliki pemahaman mendalam terhadap konteks yang menjadikan mereka memiliki pengetahuan yang relevan serta secara rutin memberikan informasi mengenai situasi yang sedang terjadi terhadap pertanyaan peneliti.

Dalam penelitian ini, *purposive sampling* merupakan teknik yang digunakan dalam menentukan informan dengan melibatkan pemilihan informan berdasarkan pertimbangan dan juga tujuan tertentu untuk memperoleh data yang relevan. Adapun daftar informan dalam penelitian ini:

- 1) Kepala Dinas Sosial Kota Jambi
- 2) Koordinator/Pendamping Sosial PKH
- 3) Penyandang disabilitas penerima manfaat PKH yang berjumlah 5 orang.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara dan dokumentasi. Hal tersebut sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk dapat menggali informasi serta memperoleh data yang dapat

digunakan sebagai bukti dalam melakukan penelitian. Berikut merupakan penjelasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai teknik pengumpulan data:

1) Wawancara

Wawancara merupakan interaksi yang dilakukan oleh dua orang untuk saling menukar informasi atau gagasan melalui pertanyaan dan jawaban. Hal ini bertujuan untuk membangun makna, mencari solusi terhadap masalah tertentu, atau mencapai tujuan yang diinginkan.

Metode wawancara terstruktur ini digunakan oleh peneliti sebagai teknik pengumpulan data dimana wawancara yang sedang berlangsung merujuk pada suatu rangkaian pertanyaan yang telah disusun. Selain itu, metode wawancara jenis semi-terstruktur juga dapat digunakan agar peneliti dapat memberikan ruang yang terbuka bagi informan dalam berbagi perspektif, pemikiran, dan juga masalah yang mungkin belum teridentifikasi secara lebih mendalam. Oleh karena itu, pihak-pihak yang telah ditentukan akan diminta untuk menyampaikan pendapat ataupun pandangan mereka secara lebih bebas untuk memungkinkan peneliti menemukan masalah atau perspektif yang belum terpikirkan sebelumnya.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa masa lalu yang berupa teks, gambar ataupun karya monumental dari seseorang. Dokumen yang akan disertakan dalam penelitian ini dapat berupa laporan kegiatan PKH, laporan hasil rapat ataupun rekapitulasi mengenai

program yang telah dilaksanakan dan hasil dokumentasi dalam bentuk gambar seperti foto kegiatan program.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, terdapat empat hal yang harus dikerjakan yaitu:

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh pada saat melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dicatat dalam bentuk catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan juga reflektif.

2) Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu langkah awal yang dilakukan dalam pencarian tema dan pola yang relevan untuk fokus penelitian. Pencatatan, merangkum, juga pemilihan informasi yang krusial merupakan prioritas dalam proses reduksi ini yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih terarah dan jelas terkait isu yang sedang diteliti. Melalui cara ini, peneliti akan semakin mudah untuk mengidentifikasi aspek-aspek kunci yang perlu dipelajari dalam implementasi program keluarga harapan dalam menangani masalah kemiskinan. Data yang telah direduksi akan menjadi landasan yang kuat untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan informasi tambahan yang lebih relevan dan mendukung pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi program keluarga harapan.

3) Penyajian Data

Penyajian data memiliki ragam bentuk untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik serta perencanaan mengenai langkah selanjutnya. Penyajian data dalam berbagai bentuk ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang komperensif serta memudahkan peneliti dalam memahami dinamika implementasi. Melalui pemahaman yang lebih baik, selanjutnya dalam implementasi program keluarga harapan di Kota Jambi dapat disusun secara lebih terarah dan lebih efektif.

4) Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap terakhir yang dilakukan dalam proses penelitian. Kesimpulan yang diambil merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan pada tahap awal penelitian. Namun, kesimpulan ini tetap terbuka untuk perkembangan yang lebih lanjut karena penelitian belum sepenuhnya mencakup seluruh aspek yang terdapat di lapangan.

Dalam konteks implementasi program keluarga harapan di Kota Jambi, kesimpulan awal dapat menggambarkan sejauh mana pelaksanaan program tersebut berjalan, apakah sudah memberikan dampak yang baik atau masih membutuhkan perbaikan. Kesimpulan ini juga dapat menyoroti keberhasilan, hambatan, potensi, serta

solusi yang muncul selama melakukan penelitian.

1.7.8 Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan cerminan validitas dari hasil data dan informasi yang didapatkan. Keabsahan data menunjukkan bahwa semua data dan informasi yang diperoleh melalui proses pengamatan dan ketelitian untuk memastikan keakuratan dari informasi yang diberikan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa data yang didapatkan dapat dipercaya. Untuk itu, dalam validitas data maka terdapat beberapa mekanisme yang bisa digunakan seperti triangulasi yang termasuk triangulasi sumber, triangulasi metode, serta triangulasi teori.

Dari beberapa jenis triangulasi yang telah disebutkan diatas, untuk menilai keabsahan data, maka peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu membandingkan atau memeriksa ulang keandalan informasi yang dikumpulkan sepanjang waktu dan menggunakan teknik dalam pendekatan kualitatif. Hal ini dapat dicapai melalui perbandingan data observasi dengan data wawancara, yang dilanjutkan dengan perbandingan pernyataan publik yang dibuat sepanjang waktu dengan pernyataan yang mengenai keadaan penelitian. Kemudian, bandingkan keadaan dengan sudut pandang orang yang diwawancarai dengan orang lain, dan membandingkan hasilnya dengan isi dokumen yang dianggap relevan.